

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Dalam penelitian pengaruh penyajian laporan realisasi anggaran, efektivitas sistem pengendalian *intern* pemerintah dan kegunaan sistem informasi akuntansi terhadap kegunaan pelaporan keuangan dalam pengambilan keputusan membutuhkan kajian teori. Beberapa teori menjelaskan mengenai kegunaan pelaporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

1. Teori Kontingensi

Teori kontingensi adalah perspektif teoritis perilaku organisasional yang menekankan cara kontingensi atau batasan, seperti ukuran, ketidakpastian lingkungan, teknologi dan tekanan lingkungan, mempengaruhi perkembangan dan fungsi organisasi (Chenhall, 2003).

Teori kontingensi harus menerapkan praktik akuntansi baru untuk mencari penyesuaian yang lebih baik antara sistem administratif dan faktor kontingensi mereka (Woods, 2009). Perancangan sistem akuntansi baru akan bergantung pada kapasitas organisasi untuk mengenali dan menyesuaikan diri dengan perubahan sebagai fungsi faktor eksternal dan internal.

Meskipun teori kontingensi telah dikembangkan di sektor swasta, dan sangat banyak digunakan dalam lingkup akuntansi manajemen,

beberapa studi menggunakan perspektif kontinjensi dalam menjelaskan reformasi dalam manajemen sektor publik dan penyidikan, yang menyelidiki terutama pengenalan sistem baru untuk pengukuran dan mengelola kinerja, juga sistem akuntansi dan pelaporan baru (Woods, 2009).

2. Teori Institusional

Dalam literatur teori kontinjensi, teori institusional menganggap bahwa harapan dan nilai, baik di dalam maupun di luar organisasi, serta peraturan masyarakat, juga dapat berperan dalam keputusan untuk mengenalkan perubahan organisasi, yaitu mengenai sistem akuntansi. Pendekatan institusional ini berbeda dengan teori-teori lain tentang sifat rasionalis, dengan memahami bahwa fenomena ekonomi, sosial, politik dan budaya membentuk lingkungan kelembagaan, membentuk makna konsep seperti individu, tindakan sosial, negara dan masyarakat (Ryan dan Nelson, 2002).

3. Kegunaan pelaporan keuangan dalam pengambilan keputusan

3.1 Definisi Kegunaan pelaporan keuangan dalam pengambilan keputusan

Kerangka konseptual PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menyatakan bahwa Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki

pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud. Dalam hal pemahaman pengguna laporan keuangan ini dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa para pengguna, terutama para pejabat publik pengelola pemerintahan (Kepala Daerah dan DPRD) banyak yang tidak mempunyai pemahaman terhadap laporan keuangan. Laporan keuangan hanya secara formalitas digunakan sebagai dasar dalam memberikan pertanggungjawaban oleh kepala daerah dan menerima pertanggungjawaban oleh DPRD, sedangkan secara substansi, muatan informasi keuangan daerah yang disajikan dalam laporan keuangan belum mampu digali sebagai dasar pengambilan keputusan untuk perbaikan periode mendatang.
- b. Disisi lain, laporan keuangan belum memberikan informasi yang mudah difahami oleh pengguna. Laporan keuangan lebih dominan menyajikan data kuantitatif yang disajikan dengan pendekatan dan bahasa akuntansi dan belum disajikan dengan pendekatan bahasa manajerial.

Defisini akuntansi yang dikeluarkan oleh *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA) sebagai berikut: Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah menyediakan data kuantitatif, terutama yang mempunyai sifat keuangan, dari satuan usaha ekonomi

dapat digunakan dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi dalam memilih alternatif-alternatif suatu keadaan. (Baridwan, 1992:1).

Mardiasmo (2009:161) menyatakan tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik sebagai berikut:

- a. Kepatuhan dan pengelolaan, laporan keuangan diberikan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas pengusaha bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.
- b. Akuntabilitas dan pelaporan Retrospektif, laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Laporan ini digunakan untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati *trend* antar kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada.
- c. Perencanaan dan informasi otorisasi, laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas dimasa yang akan datang serta memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan data.

- d. Kelangsungan organisasi, laporan keuangan berfungsi untuk membantu pembaca dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa di masa mendatang.
- e. Hubungan masyarakat, laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan prestasi yang telah dicapai kepada para pemakai atau pihak-pihak lain yang berkepentingan.
- f. Sumber fakta dan gambaran, laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam.

Kegunaan pelaporan keuangan dalam pengambilan keputusan digunakan untuk memantau hasil kerja pusat pertanggungjawaban. Dalam pertanggungjawaban APBD, setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja. Laporan keuangan yang dibuat oleh SKPD harus disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

4. Penyajian laporan realisasi anggaran

a. Informasi keuangan yang disajikan dalam LRA

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) No. 37 Tahun 2014 tentang pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Berdasarkan penyajian LRA sebagaimana tersebut di atas, maka informasi keuangan yang disajikan antara lain:

- 1) Informasi sumber pendapatan daerah yaitu sumber pendapatan asli daerah, dana perimbangan serta sumber dana lainnya (Pendapatan Daerah Lainnya yang sah).
- 2) Informasi mengenai alokasi pendanaan per jenis belanja yaitu belanja pegawai, belanja operasional, belanja modal, subsidi, belanja bunga, belanja bantuan sosial, hibah, belanja bantuan keuangan dan belanja tak terduga.
- 3) Informasi pembiayaan daerah yaitu sumber dana untuk menutup defisit anggaran serta optimalisasi dana surplus anggaran.

b. Relevansi Informasi LRA dalam pengambilan keputusan

Ditinjau dari karakteristik relevansi informasi-informasi keuangan terhadap pengambilan keputusan manajerial, maka

penyajian LRA tersebut memberikan informasi yang memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*) dan manfaat prediktif (*predictive value*) dalam mendukung pengambilan keputusan manajemen pemerintah daerah.

1) Manfaat umpan balik (*feedback value*) antara lain tingkat realisasi pencapaian target pendapatan daerah, penyerapan anggaran, sehingga dapat digunakan untuk melakukan koreksi-koreksi atas kinerja keuangan masa lalu, serta dapat digunakan untuk melakukan koreksi atas perencanaan pada tahun berikutnya dalam mengalokasikan anggaran pada tahun berikutnya (proses anggaran).

2) Manfaat prediktif (*predictive value*) dapat diperoleh dari informasi pembiayaan surplus/defisit anggaran. Berdasarkan informasi tersebut, manajer publik daerah akan mampu mengalokasikan pembayaran angsuran pinjaman pada anggaran tahun berikutnya atau menaksir pendapatan daerah dari optimalisasi dana surplus.

c. Keputusan Manajerial yang bersumber dari Informasi keuangan LRA

Dari uraian ini, terlihat jelas betapa pentingnya informasi keuangan kualitatif yang disajikan dalam CALK agar informasi keuangan kuantitatif dalam LRA dapat memiliki manfaat baik prediktif maupun umpan balik dalam pengambilan keputusan

pemerintah daerah. Beberapa tindakan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan oleh manajer publik antara lain:

- 1) Keputusan dalam manajemen pendapatan daerah
- 2) Keputusan dalam manajemen belanja daerah
- 3) Keputusan dalam manajemen pengelolaan pinjaman
- 4) Keputusan dalam melakukan investasi optimalisasi dana surplus

5. Efektivitas sistem pengendalian *intern* pemerintah

Pengendalian *intern* merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan. Pengendalian *intern* terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku. Pada tingkatan organisasi, tujuan pengendalian *intern* berkaitan dengan keandalan laporan keuangan, umpan balik yang tepat waktu terhadap pencapaian tujuan-tujuan operasional dan strategis, serta kepatuhan pada hukum dan regulasi. Aparat pengawasan *intern* pemerintah adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP bertanggungjawab langsung kepada Presiden sedangkan Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan *intern* adalah aparat pengawasan *intern* pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada menteri atau

pimpinan lembaga. Inspektorat Provinsi adalah aparat pengawasan *intern* pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada gubernur dan Inspektorat Kabupaten atau Kota adalah aparat pengawasan *intern* pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada bupati atau walikota.

Peraturan Pemerintah 60 tahun 2008 menyatakan bahwa efektivitas sistem pengendalian *intern* pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang dimaksudkan dalam peraturan ini meliputi pemerintah daerah kabupaten atau kota dan pemerintah provinsi.

Efektivitas sistem pengendalian *intern* pemerintah bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur pembentuk SPIP (Efektivitas sistem pengendalian *intern* pemerintah) antara lain:

- a. Lingkungan Pengendalian
- b. Penilaian Risiko
- c. Kegiatan Pengendalian
- d. Informasi dan Komunikasi
- e. Pemantauan Pengendalian Intern

6. Kegunaan sistem informasi akuntansi

Peraturan Pemerintah RI No. 56 Tahun 2005 menjelaskan bahwa, Sistem informasi Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SIKD adalah: “Suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Informasi keuangan daerah adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah”. Informasi keuangan daerah yang disampaikan oleh daerah kepada pemerintah mencakup:

- a. APBD dan realisasi APBD Provinsi, Kabupaten dan Kota
- b. Neraca daerah
- c. Laporan arus kas
- d. Catatan atas laporan keuangan daerah
- e. Dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan
- f. Laporan keuangan perusahaan

Penyelenggara Sistem Informasi Keuangan Daerah mempunyai beberapa fungsi diantaranya adalah:

- a. Penyusunan standar informasi keuangan daerah,
- b. Penyajian informasi keuangan daerah kepada masyarakat,
- c. Penyiapan rumusan kebijakan teknis penyajian informasi,
- d. Penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang teknologi pengembangan SIKD,
- e. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan SIKD
- f. Pembukuan SIKD yang meliputi prosedur, pengkodean, peralatan aplikasi dan pertukaran informasi,
- g. Pengkoordinasian jaringan komunikasi data dan pertukaran informasi antar instansi pemerintah.

Pemerintah daerah juga menyelenggarakan Sistem Informasi Keuangan Daerah di daerahnya masing-masing dengan tujuan untuk:

- a. Membantu Kepala Daerah dalam menyusun anggaran daerah dan laporan pengelolaan keuangan daerah,
- b. Membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan keuangan daerah,
- c. Membantu Kepala Daerah dan instansi terkait lainnya dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan daerah,
- d. Membantu menyediakan kebutuhan statistik keuangan daerah,
- e. Menyajikan informasi keuangan daerah secara terbuka kepada masyarakat,

- f. Mendukung penyediaan informasi keuangan daerah yang dibutuhkan dalam SIKD secara nasional.

Baridwan (2002) menyatakan bahwa sistem adalah suatu kerangka prosedur-prosedur yang saling berhubungan, dan disusun dengan skema yang menyeluruh dengan melalui suatu kegiatan atau fungsi utama dari entitas. Prosedur adalah urutan yang tepat dari tahapan-tahapan instruksi yang menerangkan apa yang harus dilakukan, siapa yang melakukan, kapan dilaksanakan dan bagaimana melaksanakannya. Disimpulkan bahwa sistem terdiri dari unsur-unsur yang merupakan bagian terpadu. Sistem yang saling berkaitan dan bekerjasama untuk mencapai tujuan khusus sistem yang telah ditentukan sebelumnya. Suatu sistem merupakan bagian dari sistem yang lebih besar. Subsistem menjalankan peran yang lebih terspesialisasi jika dibandingkan dengan peran sistemnya. Subsistem mempunyai hubungan timbal balik dan diorganisasikan untuk saling bekerjasama dalam mencapai suatu tujuan khusus yang telah ditentukan sebelumnya. Definisi ini lebih banyak diterima karena kenyataannya suatu sistem dapat terdiri dari beberapa subsistem.

Sistem informasi akan memberikan kemudahan bagi para akuntan manajemen untuk menghasilkan informasi keuangan yang dapat dipercaya, relevan, tepat waktu, dapat dipahami dan teruji sehingga akan membantu pengambilan keputusan. *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA) baru-baru ini telah membuat sertifikasi

baru yaitu *Certified Information Technology Professional (CITP)*. CITP mendokumentasikan keahlian sistem para akuntan yaitu akuntan yang memiliki pengetahuan luas di bidang teknologi informasi dan yang memahami bagaimana teknologi informasi dapat digunakan dalam berbagai organisasi. Hal ini mencerminkan pengakuan AICPA atas pentingnya teknologi atau sistem informasi dan hubungannya dengan akuntansi. Pada dasarnya sistem informasi telah diimplementasikan di banyak perusahaan dengan biaya yang besar, namun masalah yang timbul adalah penggunaan yang masih rendah terhadap sistem informasi secara kontinu. Rendahnya penggunaan sistem informasi diidentifikasi sebagai penyebab utama yang mendasari terjadinya *productivity paradox* yaitu investasi yang mahal di bidang sistem tetapi menghasilkan *return* yang rendah.

Dari beberapa teori dan hasil penelitian sebelumnya tentang akuntansi dan kegunaan sistem informasi akuntansi, maka peneliti menilai bahwa sistem dan teknologi informasi berperan penting dalam aktivitas operasional perusahaan/organisasi. Sistem dan teknologi informasi sangat berperan dalam bidang akuntansi untuk menyediakan informasi bagi pengambil keputusan, sehingga apabila sistem dan teknologi informasi baik akan dapat meningkatkan kinerja organisasi dan sekaligus mampu mencegah dan mendeteksi kesalahan dalam aktivitas operasi perusahaan/organisasi. Dengan demikian adanya pemanfaatan

sistem dan teknologi informasi maka perusahaan/organisasi publik/pemerintahan akan dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu tentang faktor-faktor penjelas untuk penggunaan pelaporan keuangan dalam pengambilan keputusan internal oleh manajerial pemerintahan daerah telah dilakukan baik didalam maupun luar negeri. Berikut ini adalah tinjauan dari berbagai penelitian terdahulu tentang faktor-faktor penjelas untuk penggunaan pelaporan keuangan dalam pengambilan keputusan internal oleh manajerial pemerintahan daerah.

Nogueira dan Jorge (2016) Dua implikasi penting dari penelitian ini adalah sebagai berikut: badan profesional pertama dan situasi keuangan di negara ini; kebutuhan informasi oleh pengguna internal di sektor publik, mereka menentukan kegunaan yang mereka tawarkan untuk laporan keuangan untuk pengambilan keputusan. Kedua, kurangnya pengetahuan tentang kegunaan sistem informasi akuntansi, terutama oleh politisi lokal, merupakan faktor penghambat dari kegunaan yang diberikan kepada pelaporan keuangan untuk pengambilan keputusan internal. Saat ini, ketika banyak negara mempertimbangkan reformasi akuntansi sektor publik sesuai dengan *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)*, yang seharusnya meningkatkan kecanggihan, tingkat informasi dan kegunaan pelaporan keuangan, faktor-faktor tersebut harus diperhitungkan. penelitian kuantitatif ini, kuesioner pada otoritas lokal Portugis (308), ditujukan kepada

pengambil keputusan internal (politisi - anggota Eksekutif yang bertanggung jawab atas departemen keuangan, dan pejabat - kepala pejabat departemen keuangan otoritas lokal). Kuesioner pada dasarnya diambil berdasarkan bukti dari tinjauan literatur. Penyajian laporan realisasi anggaran dan efektivitas sistem pengendalian *intern* pemerintah berpengaruh positif, sedangkan kegunaan sistem informasi akuntansi berpengaruh negatif.

Benito, Bastida dan Munoz (2010) Anggaran tidak diperhitungkan kota yang tidak ada data pembayaran anggaran, yang berarti awalnya memiliki. Kami memperlakukan file dengan menghapus data dari kota yang memiliki nilai negatif dalam pembayaran anggaran, yang menunjukkan kesalahan dalam informasi khusus Balai Kota. Data pembayaran anggaran pendapatan kota milik angka yang dipublikasikan di situs Kementerian Ekonomi dan Keuangan untuk periode waktu antara tahun 2001 dan 2006 inklusif. Alasan karena telah dipilih tahun ini ada yang 2001 adalah yang pertama dari seri sesuai data yang tersedia yang dapat dikonsultasikan di website dikutip dan 2006 adalah yang terakhir tersedia ketika kita melakukan pekerjaan ini. Karena sejumlah besar kota yang ada kadang-kadang kita bisa menghitung data likuidasi anggaran banyak dari mereka, terutama untuk ukuran yang lebih kecil. Untuk ini kita harus menambahkan bahwa pada tingkat populasi yang mewakili persentase yang lebih besar, karena untuk setiap tahun kurang dari 96% dari total penduduk, yang berarti bahwa kita memiliki informasi yang sangat representatif untuk Spanyol. Dapat

disimpulkan bahwa tekanan masalah nasional misalnya kendala anggaran (Penyajian laporan realisasi anggaran) berpengaruh negatif.

Nirmala, Alfian dan Sari (2016) Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara latar belakang pendidikan dengan tingkat kegunaan laporan keuangan, namun tidak terdapat bukti statistik yang mendukung adanya hubungan antara pengalaman profesional dengan tingkat kegunaan pelaporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kegunaan laporan keuangan untuk pengambilan keputusan internal berdasarkan persepsi pengguna internal pelaporan keuangan pemerintah. Metode penelitian menggunakan sumber data primer melalui kuesioner online untuk 93 karyawan di Departemen Inspektur Jenderal Perdagangan. Penelitian menunjukkan ada hubungan antara latar belakang pendidikan dengan tingkat kegunaan laporan keuangan, tetapi tidak ada bukti statistik yang mendukung hubungan antara tingkat pengalaman profesional dan tingkat kegunaan laporan keuangan. Kesimpulannya bahwa dalam penelitian ini efektivitas sistem pengendalian *intern* pemerintah berpengaruh negatif.

Nogueira dan Jorge (2012) Pengendalian internal penting untuk mendukung informasi kegunaan, karena merupakan memungkinkan menjamin keakuratan, peluang dan kehandalan. Membahas kecukupan model LAN Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk pembuatan keputusan internal dengan mengembangkan studi eksplorasi empiris mengevaluasi kepuasan pengguna internal mengenai model pelaporan dalam kotamadya

Braganc A. Penelitian ini adalah untuk memberikan informasi lebih lanjut, lebih baik, dan mencoba untuk memenuhi kebutuhan pengguna melalui penyebaran informasi yang berguna dan tepat yang akan memungkinkan mereka untuk menilai dan membuat keputusan dengan cara yang lebih logis dan rasional. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dan pelatihan yang sesuai pada kegunaan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan.

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian	Variabel	Hasil
Benito, Bastian dan Munoz (2010)	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan realisasi anggaran - Kegunaan pelaporan keuangan dalam pengambilan keputusan 	<p>Anggaran tidak diperhitungkan kota yang tidak ada data pembayaran anggaran, yang berarti awalnya memiliki. Kami memperlakukan file dengan menghapus data dari kota yang memiliki nilai negatif dalam pembayaran anggaran, yang menunjukkan kesalahan dalam informasi khusus Balai Kota. Dapat disimpulkan bahwa laporan realisasi berpengaruh negatif terhadap kegunaan pelaporan keuangan dalam pengambilan keputusan.</p>
Nogueira dan Jorge (2012)	<ul style="list-style-type: none"> - Kegunaan efektivitas sistem pengendalian <i>intern</i> pemerintah 	<p>Pengendalian internal penting untuk mendukung</p>

	- Kegunaan pelaporan keuangan dalam pengambilan keputusan	informasi kegunaan, Karena merupakan Memungkinkan menjamin keakuratan, peluang dan kehandalan. Jadi dapat disimpulkan bahwa efektivitas sistem pengendalian <i>intern</i> pemerintah berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan
Buylen dan Christiaens (2013)	- Kegunaan sistem informasi akuntansi - Kegunaan pelaporan keuangan dalam pengambilan keputusan	Mengenai perubahan dalam sistem akuntansi dan pelaporan dan kegunaan informasi keuangan, keseluruhan, penelitian menyebutkan kurangnya pemahaman tentang informasi baru yang disiapkan sesuai dengan basis akrual. Kegunaan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kegunaan pelaporan keuangan dalam pengambilan keputusan.
Da Cruz dan Marques (2014)	Variabel - Faktor eksternal : Penyajian laporan realisasi anggaran dan efektivitas sistem pengendalian <i>intern</i> pemerintah - Kegunaan pelaporan keuangan dalam pengambilan keputusan	faktor eksogen yang mempengaruhi kinerja ekonomi dari pada yang mendorongnya. Faktor eksogen atau eksternal yang terdiri dari penyajian laporan realisasi anggaran dan efektivitas sistem pengendalian <i>intern</i> pemerintah berpengaruh positif

		terhadap kegunaan pelaporan keuangan dalam pengambilan keputusan.
Nirmala, Alfian dan Sari (2016)	<ul style="list-style-type: none"> - Efektivitas sistem pengendalian <i>intern</i> pemerintah - Kegunaan sistem informasi akuntansi - Kegunaan pelaporan keuangan dalam pengambilan keputusan 	<p>Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara latar belakang pendidikan dengan tingkat kegunaan laporan keuangan, namun tidak terdapat bukti statistik yang mendukung adanya hubungan antara efektivitas sistem pengendalian <i>intern</i> pemerintah dengan tingkat kegunaan laporan keuangan. Efektivitas sistem pengendalian <i>intern</i> pemerintah berpengaruh negatif terhadap kegunaan pelaporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Sedangkan kegunaan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kegunaan pelaporan keuangan dalam pengambilan keputusan.</p>
Nogueira, dan Jorge (2016)	<p>X1 : Faktor Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Efektivitas sistem pengendalian <i>intern</i> pemerintah ▪ Penyajian laporan realisasi anggaran <p>X2 : Faktor Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ kegunaan sistem informasi akuntansi <p>Y : Pembuat Keputusan</p>	<p>Hubungan antara kegunaan pelaporan keuangan untuk pengambilan keputusan internal oleh pembuat keputusan pemerintah daerah, dan beberapa faktor eksternal dan internal.</p> <p>H1. Faktor eksternal berpengaruh positif terhadap kegunaan</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Politisi ▪ Pejabat keuangan 	<p>pelaporan keuangan untuk pengambilan keputusan internal oleh pengambil keputusan di kota.</p> <p>H2. Faktor internal secara negatif memengaruhi kegunaan pelaporan keuangan untuk pengambilan keputusan internal oleh pengambil keputusan di kota. Kegunaan pelaporan keuangan secara positif hanya dipengaruhi efektivitas sistem pengendalian <i>intern</i> pemerintah dan penyajian laporan realisasi anggaran akuntansi. Kegunaan sistem informasi akuntansi berpengaruh negatif.</p>
--	--	---

C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen penyajian laporan realisasi anggaran, efektivitas sistem pengendalian *intern* pemerintah dan kegunaan sistem informasi akuntansi terhadap variabel dependen yaitu kegunaan pelaporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Pelaporan keuangan dalam pengambilan keputusan yang baik sangat penting bagi semua entitas termasuk pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah yang menyusun laporan dengan baik sesuai prinsip pelaporan akuntansi pemerintahan akan membuat para pengguna laporan keuangan tersebut akan menilai kinerja para pegawai di pemerintahan daerah

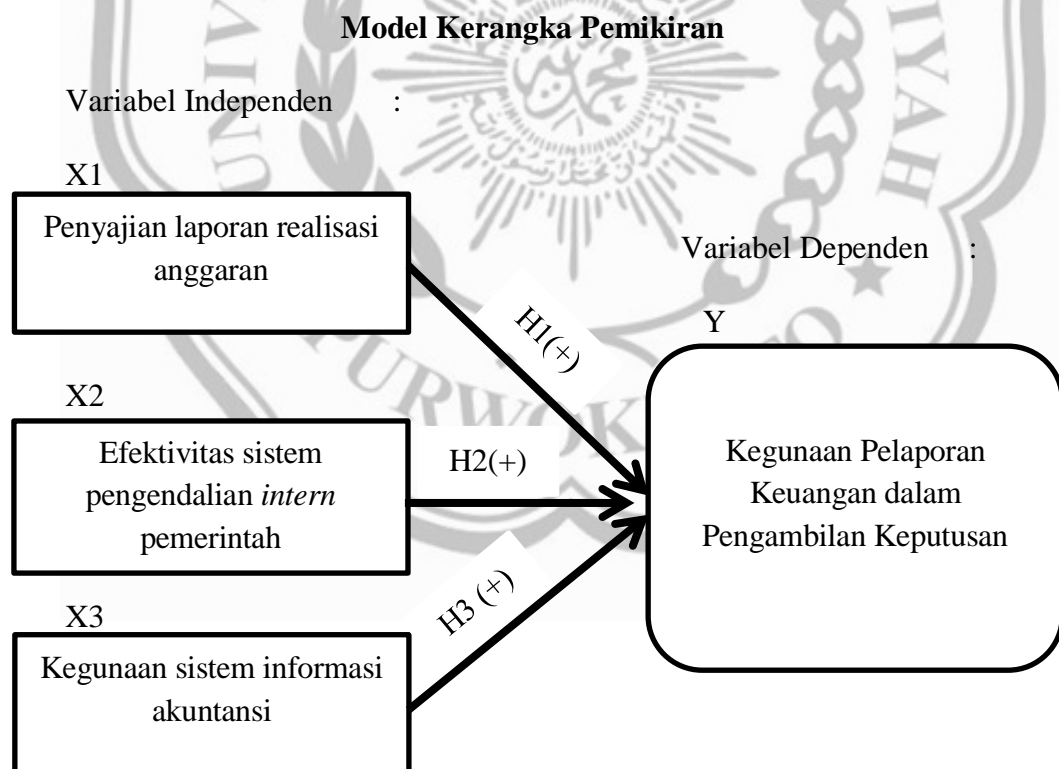
bekerja secara maksimal. Pelaporan keuangan yang baik akan memudahkan pembaca memahami informasi yang ada dalam laporan tersebut.

Penyajian laporan realisasi anggaran akan mempermudah aparat pemerintah daerah dalam menyusun anggaran untuk mencapai target-target anggaran yang telah ditetapkan. Komitmen yang tinggi dari aparat pemerintah daerah akan berimplikasi pada komitmen untuk bertanggungjawab terhadap penyusunan anggaran tersebut. Dengan demikian semakin baik penyajian laporan keuangan dalam pengambilan keputusan maka pelaporan keuangan dalam pengambilan keputusan akan mengalami kegunaan lebih baik lagi pelaporannya (Nogueira dan Jorge, 2016). Berdasarkan teori kontingensi, pemerintah akan mengalokasikan dananya sesuai batasan dan pengukuran yang telah ditetapkan sehingga tercapai tujuan yang di inginkan oleh tekanan lingkungan atau rakyat.

Pengendalian merupakan hal yang penting dalam manajemen yang baik, yang menunjang dan mewujudkan pelaporan keuangan. Penggunaan sistem pengendalian intern yang efektif dalam suatu pemerintahan akan mampu menciptakan keseluruhan proses yang baik, sehingga akan memberikan keyakinan yang memadai bagi terciptanya pengalaman asset Negara dan keandalan laporan keuangan pemerintah daerah, dalam hal tersebut akan memberikan dampak positif (Primayoni, 2014). Dalam teori kontingensi, akan meningkatkan pengendalian *intern* sehingga pengukuran atas kinerja meningkat dan dapat terciptanya pelaporan keuangan dalam pengambilan keputusan yang baik.

Begitu pula sistem informasi akuntansi yang baik, diperlukan agar dapat meningkatkan kinerja serta menghasilkan hasil yang baik pula, yakni berupa kegunaan pelaporan keuangan yang baik. Sejalan dengan teori institusional yang menyatakan bahwa harapan dan nilai pihak pemerintah yang baik, serta peraturan masyarakat, juga dapat berperan dalam keputusan untuk mengenalkan perubahan sistem di pemerintahan yaitu mengenai sistem informasi akuntansi dengan baik.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka model penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1. Metode Penelitian

D. Hipotesis

1. Pengaruh Penyajian laporan realisasi anggaran terhadap Kegunaan Pelaporan Keuangan dalam Pengambilan Keputusan.

Laporan realisasi anggaran merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu. Oleh karena itu, pelaporan realisasi anggaran memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat pencapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undang.

Penelitian yang dilakukan oleh Nogueira dan Jorge (2016) mengungkapkan bahwa penyajian laporan realisasi anggaran sangat penting saat mempertimbangkan manfaat penuntasan keuangan untuk pengambilan keputusan internal, terutama di pemerintah daerah, yang berarti bahwa badan profesional dan krisis keuangan nampak mempengaruhi kebutuhan informasi dari pembuat keputusan internal di entitas sektor publik. Sehingga, menyimpulkan bahwa penyajian laporan realisasi anggaran berpengaruh positif.

Teori kontingensi harus menerapkan praktik akuntansi baru untuk mencari penyesuaian yang lebih baik antara sistem administratif dan faktor kontingensi mereka (Woods, 2009). Perancangan sistem akuntansi baru akan bergantung pada kapasitas organisasi untuk mengenali dan

menyesuaikan diri dengan perubahan sebagai fungsi faktor eksternal dan internal.

H₁: Penyajian laporan realisasi anggaran berpengaruh secara positif terhadap Kegunaan Pelaporan Keuangan dalam Pengambilan Keputusan.

2. Pengaruh efektivitas sistem pengendalian *intern* pemerintah terhadap Kegunaan Pelaporan Keuangan dalam Pengambilan Keputusan.

Pengendalian intern adalah suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan/*fraud*. Pengendalian intern mempunyai pengaruh terhadap pelaporan keuangan karena dengan adanya pengendalian yang bersifat terus menerus atas suatu kegiatan yang berada dibawah pengawasan pimpinan (*intern*) maka, akan terciptanya tujuan organisasi yang semestinya, efektif dan efisien serta berpotensi dalam mengarahkan sebuah instansi pada pencapaian kinerja yang optimal atas pengendalian yang dilakukan, sehingga pertanggungjawaban kinerja yang menggambarkan pencapaian sasaran juga akan mengalami peningkatan.

Pengendalian intern pemerintah yang efektif dapat memberikan pengaruh positif terhadap kegunaan pelaporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian *intern* pemerintah berpengaruh positif terhadap kegunaan pelaporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Penelitian yang dilakukan oleh Nogueira dan Jorge (2016) mengungkapkan bahwa

efektivitas pengendalian *intern* pemerintah sangat penting saat mempertimbangkan manfaat penuntasan keuangan untuk pengambilan keputusan internal, terutama di pemerintah daerah, yang berarti bahwa sistem pengendalian intern pemerintah mempengaruhi pembuat keputusan internal di entitas sektor publik. Sehingga, menyimpulkan bahwa efektivitas pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif.

Pendekatan teori kontijensi pada akuntansi manajemen didasarkan pada premis bahwa tidak ada sistem pengendalian secara universal selalu tepat untuk dapat diterapkan pada setiap organisasi, tetapi hal ini tergantung pada faktor kondisi atau situasi yang ada dalam organisasi. Dilandasi dari penelitian Riyanto (2003) yang mengatakan perlunya penelitian mengenai pendekatan kontijensi dalam menguji faktor kontekstual yang mempengaruhi hubungan antara sistem pengendalian dengan kinerja, pada penelitian ini yang akan diuji adalah mengenai hubungan antara efektivitas sistem pengendalian *intern* pemerintah dan kualitas laporan keuangan.

H₂: Efektivitas sistem pengendalian *intern* pemerintah berpengaruh secara positif terhadap Kegunaan Pelaporan Keuangan dalam Pengambilan Keputusan.

3. Pengaruh Kegunaan sistem informasi akuntansi terhadap Kegunaan Pelaporan Keuangan dalam Pengambilan Keputusan.

Sistem informasi akuntansi keuangan daerah dapat didefinisikan sebagai suatu sistem pengelompokan, penggolongan, pencatatan dan pemrosesan aktivitas keuangan pemerintah daerah kedalam sebuah

laporan keuangan sebagai suatu informasi yang dapat digunakan oleh pihak tertentu dalam pengambilan keputusan. Sedangkan kegunaan sistem informasi akuntansi keuangan daerah adalah penerapan sistem informasi akuntansi tersebut oleh masing-masing SKPD dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, agar laporan keuangan yang dihasilkan berguna. Penerapan sistem keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan menggunakan sistem SIMDA juga membantu proses penyusunan laporan keuangan, semua proses administrasi keuangan tercatat dengan sistem SIMDA. Hal tersebut tentu akan menghasilkan laporan keuangan yang wajar dan sesuai dengan fakta yang ada karena semua kegiatan keuangan tercatat di sistem tersebut. Didukung dengan teori institusional yang bisa diasumsikan bahwa pemerintah berupaya memberikan harapan dan nilai yang baik kepada masyarakat, serta adanya peraturan masyarakat yang berperan dalam keputusan untuk mengenalkan perubahan, yaitu mengenai kegunaan sistem informasi akuntansi yang lebih baik lagi

Penelitian yang dilakukan oleh Nirmala, Alfian dan Sari (2016) mengungkapkan bahwa adanya pengetahuan dan pelatihan yang sesuai mengenai sistem informasi akuntansi oleh para pengambil keputusan, adalah salah satu faktor dari kegunaan yang diberikan kepada pelaporan keuangan untuk pengambilan keputusan internal, yang memungkinkan latar belakang, pelatihan, pembuat keputusan mengenai sistem pelaporan akuntansi keuangan akan mengingatkan kegunaannya karena kemudian

keputusan diambil. Sehingga, menyimpulkan bahwa kegunaan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif.

H₃: Kegunaan sistem informasi akuntansi berpengaruh secara positif terhadap Kegunaan Pelaporan Keuangan dalam Pengambilan Keputusan.

